DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Sudirman Abbas, 2017, *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*, Anugrah Berkah Bersama, Bogor.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Solok, 2022, *Profil Lembaga BAZNAS Kota Solok*, Badan Amil Zakat Nasional Kota Solok, Solok.

Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Goedhart, 1973, *Garis – Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Terjemahan: Ratmoko,Penerbit Jembatan, Jakarta.

Diana Sari, 2016, *Konsep Dasar Perpajakan*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

Fahruddin, 1992, *Ensiklopedia Alquran*, Renika Cipta, Jakarta.

Gusfahmi, 2017, *Pajak Menurut Syariah*, ed.rev, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta

H Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jumaiyah dan Adv. Wahidullah, 2020, *Pajak Penghasilan : Teori, Kasus dan Praktik dalam Pengaturan Perpajakan*, Lautan Pustaka, Jepara.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok, *2022, Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok, Solok.

Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta.

Muhammad Jawad, Mughniyah, 2001, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera , Jakarta.

Nugraha Setiawan, 2005, *Teknik Sampling*, Penerbit Departemen Pendidikan Nasional Inspektorat Jenderal.

R. Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ed.4, Refika Aditama, Bandung.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thomas Sumarsan, 2022, *Hukum Pajak*, Campustaka, Jakarta.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, ed. 10, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Wirawan Ilyas dan Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Yusri Munaf, 2015. *Hukum Administrasi Negara,* Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.

Yusuf Qardhawi, 1996, *Hukum Zakat* , Litera Internusa dan Mizan, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoninasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Lembaran Negara Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5148.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Nomor 231 Tahun 2022. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6836.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementrian Keuangan. Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209 /PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

C. Jurnal

Nengah Suastika, 2021, "Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 1.

D. Website dan Sumber Lainnya

Direktorat Jenderal Pajak, Kemetrian Keuangan Republik Indonesia, "*Sudah Tahu Tentang PTKP? Begini Penjelasannya"*, https://www.Pajak.go.id/id/artikel/sudah-tahu-tentang-ptkp-begini-penjelasannya, dikunjungi pada tanggal 26 Desember 2023, Jam 14.24 WIB.

Direktorat Jenderal Pajak, Kemetrian Keuangan Republik Indonesia, , "*Zakat Jadi Pengurang Perhitungan Pajak*", https://www.Pajak.go.id/index.php/id/artikel/Zakat -jadi-pengurang-perhitungan-Pajak, dikunjungi pada 29 Juni 2024 Pukul 15.59 WIB.

Badan Amil Zakat Nasional, *"Mengenal 8 Asnaf Zakat ", https://baznas.go.id/artikel-show/Mengenal-8-Asnaf-Zakat /261?back=https://baznas.go.id/artikel-all*, dikunjungi pada tanggal 5 Januari 2024, Jam 23.13 WIB.

Badan Amil Zakat Nasional, "*Layanan Pembayaran Zakat , Infak, Sedekah",* https://baznas.go.id/layananpembayaran, dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2024 Jam 19.40 WIB.

Katadata, *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021, dikunjungi pada tanggal 25 Oktober 2023 Jam 23.00 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan AKBP (Purn) H.Zaidi, S.H, 1 Maret 2024 Jam 9.30 WIB. Ketua BAZNAS Kota Solok Periode 2022-2027.

Wawancara dengan Bapak Diki Asnur, tanggal 1 Maret 2024 Pukul 15.00 WIB. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Solok Periode 2022-2027.

Wawancara dengan Ellen, 19 April 2024 Jam 16.40 WIB. Pemilik Toko Abadi Baru.

Wawancara dengan Indra Putra Bungsu, 1 Maret 2024 Jam 11.00 WIB. Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Solok.

Wawancara dengan Neni Nur Kembara, 15 Maret 2024 Jam 11.00 WIB. Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Padang Satu.

Wawancara dengan Teguh Alam Putra, 3 April 2024 Jam 10.00 WIB. Asisten Penyuluh Pajak Mahir KPP Pratama Solok.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA